

Kepemimpinan dalam Perspektif Al-Qur'an menurut Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka dan Al-Misbah Karya Quraish Shihab

Hana Af Idatul Latifah¹, Muswita Muswita²

^{1,2}Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Email: ¹hanaa.latifah20@mhs.uinjkt.ac.id, ¹mus.wita22@mhs.uinjkt.ac.id

Received:
05 Januari 2025

Revised:
31 Januari 2025

Accepted:
12 Februari 2025

Published:
28 Februari 2025

ABSTRACT

Keywords:

Islamic Leadership;
Al-Qur'an; Tafsir Al-
Azhar; Tafsir Al-
Misbah; Khalifah

Leadership is one of the central themes in the Qur'an with significant relevance to social, political, and religious life. Amid increasingly complex contemporary leadership challenges, including integrity crises, abuse of power, and declining public trust in leaders, a deeper understanding of leadership grounded in Qur'anic values is urgently needed. This study aims to analyze the concept of leadership in the Qur'an through a comparative examination of QS. al-Baqarah [2]: 30 and 124 and QS. Shad [38]: 26 as interpreted in Tafsir al-Azhar by Buya Hamka and Tafsir al-Misbah by M. Quraish Shihab. This research employs a qualitative approach using a library research method. Primary data were obtained from the Qur'an, Tafsir al-Azhar, and Tafsir al-Misbah, while secondary data were collected from relevant literature on Islamic leadership and Qur'anic exegesis. Data were analyzed using descriptive-comparative techniques to identify similarities, differences, and contemporary implications of the two interpretations. The findings reveal that leadership in the Qur'anic perspective is not merely a position of authority but a divine trust that entails moral, spiritual, and social responsibilities. Both Hamka and Quraish Shihab emphasize three essential elements of leadership: human beings as khalifah (vicegerents), the earth as the sphere of stewardship, and divinely granted authority as the basis of leadership legitimacy. Furthermore, ideal leadership should be founded upon justice, trustworthiness, piety, and the ability to fulfill responsibilities in accordance with divine guidance. These findings demonstrate that the Qur'anic paradigm offers an ethical leadership model that remains highly relevant for addressing contemporary leadership challenges.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Kepemimpinan
Islam; Al-Qur'an;
Tafsir Al-Azhar;
Tafsir Al-Misbah;
Khalifah

Kepemimpinan merupakan salah satu tema sentral dalam al-Qur'an yang memiliki relevansi luas terhadap kehidupan sosial, politik, dan keagamaan. Di tengah meningkatnya kompleksitas tantangan kepemimpinan kontemporer, seperti krisis integritas, penyalahgunaan kekuasaan, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap pemimpin, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai wahyu. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep kepemimpinan dalam al-Qur'an melalui kajian komparatif terhadap penafsiran QS. al-Baqarah [2]: 30 dan 124 serta QS. Shad [38]: 26 dalam Tafsir al-Azhar karya Buya Hamka dan Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Data primer bersumber dari al-Qur'an, Tafsir al-Azhar, dan Tafsir al-Misbah, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang relevan mengenai kepemimpinan Islam dan studi tafsir. Analisis dilakukan secara deskriptif-komparatif untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan relevansi pemikiran kedua mufasir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam perspektif al-Qur'an bukan sekadar posisi kekuasaan, melainkan amanah ilahiah yang mengandung tanggung jawab moral, spiritual, dan sosial. Baik Hamka maupun Quraish Shihab menegaskan bahwa kepemimpinan mencakup tiga unsur utama, yaitu manusia sebagai khalifah, bumi sebagai ruang pengabdian dan pengelolaan, serta otoritas yang dianugerahkan Allah sebagai dasar legitimasi kepemimpinan. Selain itu, kepemimpinan ideal harus berlandaskan keadilan, amanah, ketakwaan, dan kemampuan menjalankan tanggung jawab sesuai petunjuk Allah. Temuan ini menegaskan bahwa paradigma kepemimpinan al-Qur'an menawarkan model kepemimpinan etis yang tetap relevan dalam menjawab berbagai tantangan kepemimpinan modern.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

PENDAHULUAN

Kepemimpinan merupakan salah satu tema fundamental dalam kehidupan manusia karena berkaitan dengan proses mengarahkan, memengaruhi, dan mengelola kehidupan individu maupun masyarakat menuju tujuan tertentu (Nurwahidah & Iskandar, 2022; Arvienu, 2024; Srianahayu, 2024). Dalam setiap organisasi, komunitas, maupun institusi sosial, keberhasilan dan keberlanjutan suatu sistem sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan yang dimiliki (Sahadi et al., 2022; Fitri et al., 2024; Mujahid, 2024). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengambilan keputusan, tetapi juga menjadi faktor strategis dalam membangun visi, menjaga stabilitas organisasi, serta menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan (Purwanto et al., 2020; Sitio et al., 2023; Adawiyah & Ummah, 2024; Srianahayu, 2024). Oleh sebab itu, kepemimpinan selalu menjadi isu yang relevan untuk dikaji, terutama dalam konteks masyarakat yang terus menghadapi dinamika sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang semakin kompleks.

Dalam perspektif Islam, kepemimpinan memiliki kedudukan yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan amanah manusia sebagai khalifah di muka bumi. Konsep khalifah dalam al-Qur'an menegaskan bahwa manusia tidak hanya berfungsi sebagai penghuni bumi, tetapi juga sebagai pengelola, penjaga, dan penanggung jawab terhadap terciptanya kehidupan yang adil, harmonis, dan berorientasi pada kemaslahatan (Adawiyah & Ummah, 2024; Khamid, 2024; Subaidi et al., 2024; Abdelwahed et al., 2025). Kepemimpinan dalam Islam tidak dipahami semata-mata sebagai kekuasaan atau otoritas formal, melainkan sebagai tanggung jawab moral dan spiritual yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Karena itu, legitimasi kepemimpinan dalam Islam tidak hanya ditentukan oleh kemampuan manajerial, tetapi juga oleh integritas, keadilan, amanah, dan ketakwaan seorang pemimpin.

Al-Qur'an memberikan perhatian yang besar terhadap persoalan kepemimpinan melalui berbagai istilah dan narasi yang menggambarkan tugas, fungsi, serta karakter seorang pemimpin (Alqhaiwi et al., 2023; Karim et al., 2023; Mawardi et al., 2023). Beberapa ayat yang sering dijadikan rujukan dalam kajian kepemimpinan Islam antara lain QS. al-Baqarah [2]: 30 tentang pengangkatan manusia sebagai khalifah di bumi, QS. al-Baqarah [2]: 124 mengenai kepemimpinan Nabi Ibrahim sebagai imam bagi umat manusia, dan QS. Shad [38]: 26 yang menjelaskan amanah kepemimpinan Nabi Dawud dalam menegakkan keadilan. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam selalu dikaitkan dengan tanggung jawab, keadilan, dan pengabdian kepada Allah, bukan sekadar pencapaian kekuasaan.

Di era kontemporer, pembahasan mengenai kepemimpinan menjadi semakin penting karena berbagai krisis yang muncul dalam praktik kepemimpinan modern (Chughtai et al., 2023; Karim et al., 2023; Kareem et al., 2025). Fenomena penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, konflik kepentingan, lemahnya integritas, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap pemimpin menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas kepemimpinan dan realitas sosial. Situasi ini mendorong perlunya pengkajian kembali konsep kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai normatif dan etis. Dalam konteks tersebut, al-Qur'an menawarkan paradigma kepemimpinan yang tidak hanya berorientasi pada efektivitas organisasi, tetapi juga pada tanggung jawab moral, keadilan sosial, dan keberlanjutan kehidupan manusia.

Pemahaman terhadap konsep kepemimpinan al-Qur'an tidak dapat dilepaskan dari kontribusi para mufasir yang menafsirkan ayat-ayat kepemimpinan sesuai dengan konteks sosial dan intelektual zamannya. Di Indonesia, dua karya tafsir yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan studi al-Qur'an adalah *Tafsir al-Azhar* karya Buya Hamka dan *Tafsir al-Misbah* karya M. Quraish Shihab (Shihab, 2009). Hamka dikenal sebagai mufasir yang mengintegrasikan

pesan-pesan al-Qur'an dengan realitas sosial, budaya, dan kebangsaan Indonesia. Sementara itu, Quraish Shihab menawarkan pendekatan yang lebih kontekstual, linguistik, dan komprehensif dalam memahami pesan-pesan al-Qur'an. Kedua tafsir tersebut memberikan perspektif yang kaya mengenai konsep kepemimpinan, baik dari aspek teologis, etis, maupun sosial.

Meskipun kajian mengenai kepemimpinan Islam telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian masih berfokus pada konsep kepemimpinan secara umum atau hanya mengkaji satu karya tafsir tertentu. Kajian yang secara khusus membandingkan pemikiran Buya Hamka dan M. Quraish Shihab mengenai ayat-ayat kepemimpinan masih relatif terbatas. Padahal, perbandingan kedua tafsir tersebut penting untuk memahami bagaimana konsep kepemimpinan al-Qur'an ditafsirkan dalam konteks sosial yang berbeda serta bagaimana relevansinya dalam menjawab tantangan kepemimpinan kontemporer.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kepemimpinan dalam al-Qur'an melalui kajian komparatif terhadap penafsiran QS. al-Baqarah [2]: 30 dan 124 serta QS. Shad [38]: 26 dalam *Tafsir al-Azhar* karya Buya Hamka dan *Tafsir al-Misbah* karya M. Quraish Shihab. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan studi tafsir tematik tentang kepemimpinan sekaligus menawarkan model kepemimpinan Qur'ani yang relevan bagi kehidupan masyarakat dan tata kelola organisasi di era modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis konsep kepemimpinan dalam al-Qur'an melalui penafsiran para mufasir, bukan pada pengumpulan data lapangan (Creswell, 2016). Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti melakukan eksplorasi mendalam terhadap sumber-sumber tekstual guna memahami konstruksi makna, konteks penafsiran, serta relevansi konsep kepemimpinan dalam perspektif Islam. Dalam studi tafsir, pendekatan ini banyak digunakan untuk mengkaji gagasan, nilai, dan paradigma yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an melalui interpretasi para ulama dan cendekiawan Muslim (Sugiyono, 2023).

Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*) dan komparatif (*muqaran*). Pendekatan tematik digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan kepemimpinan, khususnya QS. al-Baqarah [2]: 30 dan 124 serta QS. Shad [38]: 26. Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan penafsiran kedua mufasir, yaitu Buya Hamka dalam *Tafsir al-Azhar* dan M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah*, sehingga dapat ditemukan persamaan, perbedaan, serta karakteristik pemikiran masing-masing dalam memahami konsep kepemimpinan Islam.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder (Almusaed et al., 2025). Data primer meliputi al-Qur'an sebagai sumber utama kajian, *Tafsir al-Azhar* karya Buya Hamka, dan *Tafsir al-Misbah* karya M. Quraish Shihab, khususnya pada ayat-ayat yang menjadi fokus penelitian. Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur pendukung berupa buku, artikel jurnal, prosiding, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas kepemimpinan Islam, studi tafsir, konsep khalifah, imam, keadilan dalam pemerintahan, serta pemikiran Hamka dan Quraish Shihab. Penggunaan berbagai sumber tersebut bertujuan memperkuat analisis serta memperluas pemahaman terhadap konteks penafsiran yang dikaji.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan menelusuri, membaca, mengidentifikasi, dan mengelompokkan berbagai literatur yang relevan dengan tema penelitian

(Ahmed, 2024; Ahmed et al., 2025; Almusaed et al., 2025). Seluruh data kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama, seperti konsep khalifah, amanah kepemimpinan, keadilan, otoritas, tanggung jawab sosial, dan relasi antara pemimpin dengan masyarakat. Proses ini dilakukan secara sistematis agar memudahkan peneliti dalam menemukan pola-pola pemikiran yang berkembang dalam kedua karya tafsir.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik *content analysis* (analisis isi) yang dipadukan dengan analisis komparatif (Ahmed et al., 2025). Tahap pertama dilakukan dengan memahami konteks ayat dan penafsiran masing-masing mufasir secara mendalam. Tahap kedua adalah proses pengkodean tematik (*thematic coding*) untuk mengidentifikasi konsep-konsep utama yang berkaitan dengan kepemimpinan. Tahap ketiga adalah membandingkan hasil penafsiran Buya Hamka dan M. Quraish Shihab guna menemukan titik temu maupun perbedaan perspektif. Tahap terakhir berupa sintesis konseptual untuk merumuskan karakteristik kepemimpinan Qur'ani yang dapat ditarik dari kedua tafsir tersebut serta relevansinya bagi praktik kepemimpinan kontemporer.

Untuk menjamin validitas data, penelitian menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai literatur primer dan sekunder (Miles et al., 2018). Selain itu, interpretasi hasil penelitian dilakukan secara kontekstual dengan mempertimbangkan latar belakang sosial, intelektual, dan metodologis masing-masing mufasir. Melalui prosedur tersebut, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep kepemimpinan dalam al-Qur'an serta kontribusi pemikiran Buya Hamka dan M. Quraish Shihab dalam pengembangan wacana kepemimpinan Islam di era modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian terhadap QS. al-Baqarah [2]: 30 dan 124 serta QS. Shad [38]: 26 menunjukkan bahwa konsep kepemimpinan dalam al-Qur'an tidak semata-mata dipahami sebagai posisi kekuasaan atau otoritas politik. Kepemimpinan dipresentasikan sebagai amanah ilahiah yang mengandung dimensi moral, spiritual, dan sosial secara bersamaan. Dalam perspektif ini, seorang pemimpin bukan hanya bertugas mengelola masyarakat, tetapi juga bertanggung jawab menjaga keteraturan kehidupan sesuai dengan nilai-nilai yang ditetapkan Allah Swt. Pemahaman tersebut menjadi titik temu antara Tafsir al-Azhar karya Buya Hamka dan Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab, meskipun keduanya menggunakan penekanan interpretatif yang berbeda.

Hamka cenderung menempatkan kepemimpinan dalam kerangka pembentukan karakter dan tanggung jawab sosial umat. Penafsirannya banyak dipengaruhi oleh pengalaman sejarah bangsa Indonesia, perjuangan kemerdekaan, dan kebutuhan akan figur pemimpin yang berintegritas. Sementara itu, Quraish Shihab lebih menonjolkan pendekatan linguistik dan kontekstual sehingga konsep kepemimpinan dipahami sebagai amanah yang harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, kompetensi, dan tanggung jawab moral. Perbedaan pendekatan ini memperkaya pemahaman tentang kepemimpinan Qur'ani karena menunjukkan bahwa pesan al-Qur'an tetap relevan untuk berbagai konteks sosial dan historis.

Hasil analisis menemukan sedikitnya tiga tema utama yang menjadi fondasi kepemimpinan dalam al-Qur'an menurut kedua tafsir tersebut, yaitu manusia sebagai khalifah Allah di bumi, kepemimpinan sebagai amanah yang mensyaratkan keadilan, dan kepemimpinan sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Ketiga tema tersebut saling berkaitan dan membentuk kerangka konseptual kepemimpinan Islam yang tidak hanya berorientasi pada efektivitas pemerintahan, tetapi juga pada pembentukan peradaban yang berkeadaban.

Manusia sebagai Khalifah: Fondasi Ontologis Kepemimpinan dalam al-Qur'an

Konsep kepemimpinan dalam al-Qur'an berakar pada gagasan khalifah sebagaimana termaktub dalam QS. al-Baqarah [2]: 30. Ayat ini menjadi salah satu landasan utama yang menjelaskan posisi manusia sebagai wakil Allah di bumi. Dalam perspektif Tafsir al-Azhar, Hamka menafsirkan istilah khalifah sebagai mandat yang diberikan Allah kepada manusia untuk mengelola kehidupan secara bertanggung jawab. Kekhalifahan tidak dipahami sebagai hak istimewa yang melekat pada individu tertentu, melainkan sebagai tugas kolektif manusia untuk memelihara keteraturan dan kemakmuran bumi.

Hamka memandang bahwa pemilihan manusia sebagai khalifah menunjukkan tingginya martabat manusia dibandingkan makhluk lain. Kemampuan berpikir, berilmu, dan mengambil keputusan menjadi modal utama yang memungkinkan manusia menjalankan tugas tersebut (Rahman et al., 2022). Karena itu, kepemimpinan menurut Hamka tidak dapat dipisahkan dari kualitas moral dan intelektual seseorang. Kekuasaan tanpa moralitas hanya akan melahirkan kerusakan, sedangkan ilmu tanpa tanggung jawab dapat mengantarkan manusia pada penyalahgunaan wewenang.

Pandangan tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan berbagai persoalan kepemimpinan kontemporer. Banyak krisis kepemimpinan yang terjadi bukan disebabkan oleh kurangnya sumber daya atau kelemahan institusi, melainkan oleh hilangnya kesadaran bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam kerangka ini, Hamka menggeser orientasi kepemimpinan dari paradigma kekuasaan menuju paradigma pengabdian. Pemimpin ideal bukan mereka yang mampu menguasai masyarakat, melainkan mereka yang mampu melayani dan menjaga kemaslahatan masyarakat.

Sementara itu, Quraish Shihab memberikan penjelasan yang lebih luas mengenai konsep khalifah. Menurutnya, istilah tersebut tidak selalu merujuk pada penguasa politik, tetapi dapat mencakup setiap manusia yang menjalankan fungsi pengelolaan dan tanggung jawab di muka bumi. Penafsiran ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam al-Qur'an bersifat universal dan tidak terbatas pada jabatan formal. Setiap individu memiliki ruang kepemimpinan sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Penekanan Quraish Shihab terhadap aspek tanggung jawab memperlihatkan bahwa kekhalifahan bukan sekadar status, melainkan proses yang menuntut kompetensi dan integritas. Allah memberikan amanah kepemimpinan kepada manusia karena manusia dibekali kemampuan untuk belajar, memahami, dan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan moral. Oleh sebab itu, keberhasilan kepemimpinan tidak hanya diukur dari pencapaian material, tetapi juga dari kemampuan menjaga keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan nilai-nilai ketuhanan.

Secara konseptual, baik Hamka maupun Quraish Shihab sepakat bahwa kepemimpinan berangkat dari pengakuan terhadap posisi manusia sebagai khalifah Allah. Persamaan ini menunjukkan bahwa legitimasi kepemimpinan dalam Islam tidak berasal dari kekuatan politik semata, melainkan dari kesediaan menjalankan amanah ilahiah secara bertanggung jawab. Pemahaman tersebut menjadi fondasi ontologis bagi seluruh konsep kepemimpinan Qur'ani yang kemudian berkembang dalam pembahasan mengenai keadilan, amanah, dan kemaslahatan sosial.

Kepemimpinan sebagai Amanah dan Ujian Moral: Analisis QS. al-Baqarah [2]: 124

Apabila QS. al-Baqarah [2]: 30 menjelaskan fondasi ontologis kepemimpinan melalui konsep khalifah, maka QS. al-Baqarah [2]: 124 memperlihatkan dimensi etis dan moral dari kepemimpinan itu sendiri. Ayat ini mengisahkan pengangkatan Nabi Ibrahim sebagai imam bagi

umat manusia setelah berhasil melewati berbagai ujian yang diberikan Allah Swt. Narasi tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam perspektif al-Qur'an bukanlah hak yang diperoleh karena faktor keturunan, status sosial, atau kekuatan politik, melainkan amanah yang diberikan kepada individu yang mampu membuktikan kualitas moral dan spiritualnya.

Dalam *Tafsir al-Azhar*, Hamka menjelaskan bahwa ujian yang dialami Nabi Ibrahim merupakan proses pendidikan ilahiah yang membentuk kapasitas kepemimpinan (Hamka, 2015). Berbagai cobaan yang dihadapi, mulai dari penolakan masyarakat, ancaman kekuasaan tiranik, hingga pengorbanan keluarga, membentuk karakter kepemimpinan yang kokoh dan berorientasi pada nilai-nilai kebenaran. Menurut Hamka, ayat ini menegaskan bahwa kepemimpinan yang sah tidak lahir secara instan, tetapi melalui proses panjang yang menguji integritas, kesabaran, dan keteguhan prinsip.

Penaafsiran tersebut memberikan pesan penting bahwa kualitas kepemimpinan tidak dapat diukur hanya melalui kemampuan administratif atau popularitas publik. Banyak pemimpin mampu memperoleh legitimasi politik melalui dukungan massa atau kekuatan ekonomi, tetapi gagal menjalankan amanah karena tidak memiliki kedewasaan moral yang memadai. Dalam perspektif Hamka, keberhasilan Nabi Ibrahim melewati ujian menunjukkan bahwa kepemimpinan yang ideal mensyaratkan keselarasan antara kapasitas intelektual, kekuatan spiritual, dan komitmen terhadap nilai-nilai ketuhanan.

Quraish Shihab memberikan perhatian yang lebih mendalam pada penggunaan istilah *imam* dalam ayat tersebut (Shihab, 2021). Menurutnya, imam tidak hanya berarti pemimpin formal, tetapi juga figur teladan yang menjadi rujukan masyarakat dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Karena itu, kepemimpinan dalam Islam tidak cukup hanya memiliki kewenangan, tetapi harus mampu menghadirkan keteladanan yang dapat diikuti oleh masyarakat. Seorang pemimpin menjadi pusat orientasi sosial sehingga setiap tindakan dan kebijakannya memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan publik.

Salah satu bagian paling penting dalam ayat ini adalah pernyataan Allah bahwa janji kepemimpinan tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Baik Hamka maupun Quraish Shihab menempatkan frasa tersebut sebagai prinsip fundamental dalam konsep kepemimpinan Islam. Kezaliman tidak hanya dipahami sebagai tindakan penindasan fisik atau penyalahgunaan kekuasaan, tetapi mencakup seluruh bentuk penyimpangan dari nilai keadilan dan kebenaran. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki kekuasaan tetapi tidak menjalankan amanah secara adil telah kehilangan legitimasi moral kepemimpinannya.

Perspektif ini menunjukkan bahwa al-Qur'an menempatkan keadilan sebagai syarat utama kepemimpinan. Keadilan bukan sekadar salah satu sifat pemimpin, melainkan fondasi yang menentukan layak atau tidaknya seseorang memegang amanah publik. Prinsip tersebut sangat relevan dengan berbagai persoalan kontemporer, terutama ketika masyarakat dihadapkan pada praktik korupsi, nepotisme, penyalahgunaan jabatan, dan berbagai bentuk ketidakadilan struktural. Dalam konteks ini, ayat tersebut memberikan pesan bahwa keberhasilan kepemimpinan tidak diukur dari lamanya seseorang berkuasa, melainkan dari kemampuannya menjaga amanah dan menegakkan keadilan.

Lebih jauh lagi, ayat ini memperlihatkan bahwa kepemimpinan dalam Islam memiliki hubungan erat dengan akuntabilitas. Pemimpin tidak hanya bertanggung jawab kepada masyarakat yang dipimpinnya, tetapi juga kepada Allah sebagai pemberi amanah. Dimensi transendental ini membedakan konsep kepemimpinan Islam dari berbagai teori kepemimpinan modern yang umumnya berorientasi pada efektivitas organisasi atau pencapaian tujuan

institusional. Dalam paradigma al-Qur'an, keberhasilan kepemimpinan selalu dihubungkan dengan tanggung jawab moral dan spiritual yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.

Dari perspektif teoritis, penafsiran Hamka dan Quraish Shihab menunjukkan bahwa kepemimpinan Qur'ani dibangun di atas prinsip *meritokrasi moral*. Seseorang memperoleh legitimasi kepemimpinan bukan karena garis keturunan atau privilese sosial, tetapi karena kemampuan membuktikan kualitas dirinya melalui integritas, keteladanan, dan komitmen terhadap keadilan. Konsep ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan model kepemimpinan Islam yang relevan dengan tuntutan tata kelola modern, terutama dalam membangun sistem kepemimpinan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

Dengan demikian, QS. al-Baqarah [2]: 124 memperlihatkan bahwa kepemimpinan merupakan amanah yang hanya dapat dijalankan secara efektif oleh individu yang memiliki kualitas moral dan spiritual yang memadai. Ayat ini sekaligus menegaskan bahwa keadilan dan integritas bukan sekadar pelengkap kepemimpinan, melainkan syarat utama yang menentukan legitimasi seorang pemimpin dalam perspektif al-Qur'an.

Keadilan sebagai Pilar Kepemimpinan Qur'ani: Analisis QS. Shad [38]: 26

Jika QS. al-Baqarah [2]: 30 menegaskan manusia sebagai khalifah dan QS. al-Baqarah [2]: 124 menjelaskan kepemimpinan sebagai amanah yang diberikan kepada individu yang lulus ujian moral, maka QS. Shad [38]: 26 memberikan penekanan pada tujuan utama kepemimpinan, yaitu menegakkan keadilan. Ayat ini berbicara tentang Nabi Dawud yang diberikan amanah sebagai khalifah di bumi dan diperintahkan untuk memutuskan perkara di antara manusia secara adil serta tidak mengikuti hawa nafsu. Oleh karena itu, ayat ini menjadi salah satu fondasi utama dalam konsep kepemimpinan Islam karena menghubungkan secara langsung antara kekuasaan, tanggung jawab, dan keadilan.

Dalam *Tafsir al-Azhar*, Hamka menjelaskan bahwa pengangkatan Nabi Dawud sebagai khalifah tidak hanya menunjukkan kedudukannya sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai penegak hukum dan penjaga ketertiban sosial. Menurut Hamka, tugas utama seorang pemimpin adalah memastikan bahwa keadilan hadir dalam kehidupan masyarakat. Kekuasaan tidak diberikan untuk memenuhi kepentingan pribadi, melainkan untuk melayani kepentingan umum dan menjaga keseimbangan kehidupan sosial. Ketika seorang pemimpin menggunakan kekuasaannya demi kepentingan kelompok tertentu atau kepentingan dirinya sendiri, maka pada saat itu ia telah menyimpang dari amanah yang diberikan Allah.

Hamka memberikan perhatian khusus pada larangan mengikuti hawa nafsu (*la tattabi' al-hawa*). Baginya, kerusakan kepemimpinan sering kali bermula ketika pemimpin lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan masyarakat. Hawa nafsu dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti keserakahan terhadap kekuasaan, kecenderungan mempertahankan jabatan dengan segala cara, keberpihakan yang tidak adil, maupun penggunaan otoritas untuk kepentingan keluarga dan kelompok tertentu. Karena itu, kemampuan mengendalikan diri menjadi salah satu syarat penting dalam kepemimpinan Islam.

Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah* menafsirkan ayat ini sebagai pedoman universal bagi seluruh pemegang otoritas. Menurutnya, perintah untuk memutuskan perkara secara adil tidak hanya berlaku bagi hakim atau kepala negara, tetapi juga bagi setiap individu yang memiliki kewenangan terhadap orang lain. Dalam keluarga, pendidikan, organisasi, maupun pemerintahan, prinsip keadilan harus menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan.

Kepemimpinan kehilangan legitimasi ketika keputusan yang dihasilkan tidak lagi berpijak pada prinsip keadilan.

Quraish Shihab juga menegaskan bahwa keadilan dalam al-Qur'an tidak identik dengan perlakuan yang sama secara mekanis, melainkan menempatkan sesuatu pada posisi yang semestinya. Karena itu, seorang pemimpin dituntut memiliki kemampuan memahami realitas sosial secara objektif sebelum mengambil keputusan. Keadilan memerlukan kebijaksanaan, integritas, dan keberanian moral untuk menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Penafsiran Hamka dan Quraish Shihab menunjukkan adanya kesamaan mendasar bahwa keadilan merupakan inti dari seluruh aktivitas kepemimpinan. Kekuasaan dalam Islam tidak pernah dipisahkan dari tanggung jawab moral. Semakin besar kekuasaan yang dimiliki seseorang, semakin besar pula tuntutan untuk berlaku adil. Dalam kerangka ini, kepemimpinan bukanlah privilese yang memberikan hak istimewa, melainkan amanah yang menuntut pengorbanan dan tanggung jawab yang lebih besar.

Relevansi ayat ini semakin terlihat dalam konteks kontemporer ketika berbagai negara menghadapi krisis kepemimpinan yang ditandai oleh korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan, dan lemahnya penegakan hukum. Berbagai persoalan tersebut pada dasarnya berakar pada hilangnya orientasi keadilan dalam praktik kepemimpinan. Pemimpin lebih sering menjadikan kekuasaan sebagai instrumen dominasi daripada sarana pelayanan publik. Dalam situasi seperti ini, QS. Shad [38]: 26 menghadirkan kritik normatif yang sangat kuat bahwa legitimasi kepemimpinan bergantung pada kemampuan menghadirkan keadilan dalam kehidupan masyarakat.

Dari perspektif teori kepemimpinan modern, konsep yang ditawarkan ayat ini memiliki kedekatan dengan gagasan *ethical leadership* dan *servant leadership*. Kedua teori tersebut menempatkan integritas moral, tanggung jawab sosial, dan orientasi pelayanan sebagai inti kepemimpinan. Meski demikian, konsep kepemimpinan Qur'ani memiliki dimensi yang lebih luas karena keadilan tidak hanya dipahami sebagai kewajiban sosial, tetapi juga sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Dengan demikian, keadilan memiliki dimensi horizontal sekaligus vertikal yang menghubungkan hubungan manusia dengan sesamanya dan hubungan manusia dengan Tuhan.

Melalui QS. Shad [38]: 26, al-Qur'an memberikan pesan bahwa keberhasilan seorang pemimpin tidak diukur dari luasnya wilayah kekuasaan, banyaknya pengikut, atau lamanya masa jabatan, melainkan dari kemampuannya menjaga keadilan dan menghindari penyalahgunaan wewenang. Ayat ini memperlihatkan bahwa keadilan merupakan indikator utama keberhasilan kepemimpinan sekaligus fondasi bagi terwujudnya kemaslahatan sosial.

Sintesis Komparatif Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Misbah

Berdasarkan analisis terhadap QS. al-Baqarah [2]: 30, QS. al-Baqarah [2]: 124, dan QS. Shad [38]: 26, dapat disimpulkan bahwa Hamka dan Quraish Shihab memiliki titik temu yang kuat dalam memahami kepemimpinan sebagai amanah ilahiah yang menuntut tanggung jawab moral, keteladanan, dan keadilan. Keduanya memandang manusia sebagai khalifah yang diberi mandat untuk mengelola kehidupan berdasarkan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan.

Perbedaannya terletak pada titik tekan interpretasi. Hamka cenderung menonjolkan aspek moralitas, perjuangan, dan pembentukan karakter pemimpin dalam konteks sosial kemasyarakatan. Penafsirannya banyak dipengaruhi oleh pengalaman historis bangsa Indonesia, terutama dalam menghadapi kolonialisme, perjuangan kemerdekaan, dan pembangunan

karakter umat. Sebaliknya, Quraish Shihab lebih menekankan aspek linguistik, kontekstual, dan universalitas pesan al-Qur'an sehingga konsep kepemimpinan yang ditawarkannya lebih mudah dikaitkan dengan dinamika masyarakat modern yang plural dan kompleks.

Meskipun memiliki pendekatan yang berbeda, kedua tafsir tersebut menghasilkan konstruksi kepemimpinan yang saling melengkapi. Kepemimpinan dalam perspektif al-Qur'an bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah yang mensyaratkan kapasitas intelektual, integritas moral, keteladanan sosial, serta komitmen terhadap keadilan. Konsep ini menjadi sangat relevan bagi pengembangan model kepemimpinan Islam kontemporer yang tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga mampu menghadirkan kemaslahatan, menjaga amanah publik, dan mewujudkan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat.

Relevansi Konsep Kepemimpinan Qur'ani dalam Konteks Kontemporer

Kajian terhadap *Tafsir al-Azhar* dan *Tafsir al-Misbah* menunjukkan bahwa konsep kepemimpinan dalam al-Qur'an memiliki relevansi yang sangat kuat dalam menjawab berbagai tantangan kepemimpinan modern. Krisis kepemimpinan yang terjadi di berbagai sektor dewasa ini tidak hanya disebabkan oleh lemahnya kapasitas manajerial, tetapi juga oleh menurunnya integritas moral para pemegang kekuasaan. Fenomena korupsi, penyalahgunaan jabatan, konflik kepentingan, serta rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan menunjukkan bahwa persoalan utama kepemimpinan bukan semata-mata persoalan teknis, melainkan persoalan etika dan moralitas.

Dalam perspektif al-Qur'an, kepemimpinan tidak pernah dipahami sebagai instrumen dominasi, melainkan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Konsep ini berbeda dengan paradigma kekuasaan yang sering berkembang dalam praktik politik modern yang menempatkan jabatan sebagai sarana memperoleh keuntungan ekonomi, sosial, maupun politik. Al-Qur'an justru mengajarkan bahwa semakin tinggi posisi seseorang, semakin besar tanggung jawab yang dipikulnya di hadapan masyarakat dan di hadapan Allah Swt.

Pemahaman ini menjadi penting dalam konteks demokrasi kontemporer. Demokrasi sering kali menekankan aspek prosedural seperti pemilihan umum, legitimasi suara mayoritas, dan mekanisme representasi politik. Meskipun aspek-aspek tersebut penting, legitimasi formal saja tidak cukup untuk menghasilkan kepemimpinan yang berkualitas. Al-Qur'an menawarkan dimensi tambahan berupa legitimasi moral yang dibangun melalui integritas, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Seorang pemimpin tidak hanya dinilai dari bagaimana ia memperoleh kekuasaan, tetapi juga dari bagaimana ia menggunakan kekuasaan tersebut untuk mewujudkan kemaslahatan publik.

Dalam QS. al-Baqarah [2]: 124, kepemimpinan dikaitkan dengan proses ujian dan pembuktian kualitas diri. Pesan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan bukanlah hak yang diberikan secara otomatis berdasarkan status sosial, garis keturunan, kekayaan, ataupun popularitas. Kepemimpinan harus diberikan kepada individu yang memiliki kapasitas moral dan kompetensi yang memadai. Prinsip ini sangat relevan dalam sistem rekrutmen kepemimpinan modern yang sering kali masih dipengaruhi oleh politik identitas, oligarki, dan patronase.

Di sisi lain, QS. Shad [38]: 26 menegaskan bahwa keadilan merupakan orientasi utama dalam setiap tindakan kepemimpinan. Dalam konteks pemerintahan modern, prinsip ini dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bentuk kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, perlindungan kelompok rentan, pemerataan pembangunan, serta penegakan hukum yang tidak diskriminatif. Kepemimpinan yang adil bukan sekadar mematuhi aturan hukum, tetapi

juga memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

Hamka dan Quraish Shihab sama-sama menekankan bahwa keadilan tidak dapat dipisahkan dari kemampuan mengendalikan hawa nafsu. Dalam konteks kekinian, hawa nafsu dapat diwujudkan dalam bentuk korupsi, nepotisme, penyalahgunaan kewenangan, maupun kecenderungan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Karena itu, penguatan karakter moral menjadi elemen penting dalam proses pembentukan pemimpin yang berkualitas. Pendidikan kepemimpinan yang hanya berfokus pada aspek teknis dan administratif tanpa disertai pembinaan etika berpotensi menghasilkan pemimpin yang cakap secara manajerial tetapi lemah secara moral.

Selain itu, konsep khalifah dalam QS. al-Baqarah [2]: 30 juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap tata kelola sosial dan lingkungan. Khalifah tidak hanya bertugas mengatur hubungan antarmanusia, tetapi juga menjaga keseimbangan alam sebagai bagian dari amanah Allah Swt. Perspektif ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan paradigma kepemimpinan berkelanjutan (*sustainable leadership*) yang saat ini menjadi perhatian global. Pemimpin tidak hanya bertanggung jawab terhadap generasi sekarang, tetapi juga terhadap generasi yang akan datang melalui pengelolaan sumber daya yang adil dan berkelanjutan.

Dalam dunia pendidikan, konsep kepemimpinan Qur'ani juga memiliki relevansi yang signifikan. Pemimpin pendidikan tidak hanya bertugas mengelola lembaga secara administratif, tetapi juga membentuk karakter, budaya organisasi, dan orientasi nilai yang menjadi dasar pengembangan sumber daya manusia. Oleh sebab itu, nilai-nilai amanah, keadilan, keteladanan, dan tanggung jawab sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an perlu menjadi bagian integral dalam pengembangan kepemimpinan pendidikan Islam.

Lebih jauh lagi, perkembangan teknologi digital dan media sosial telah mengubah pola interaksi antara pemimpin dan masyarakat. Di satu sisi, teknologi membuka ruang partisipasi yang lebih luas. Di sisi lain, teknologi juga menghadirkan tantangan berupa penyebaran informasi yang tidak akurat, polarisasi sosial, dan munculnya budaya popularitas yang sering kali lebih dihargai dibandingkan kapasitas dan integritas. Dalam situasi seperti ini, prinsip-prinsip kepemimpinan Qur'ani menjadi semakin relevan sebagai landasan etik yang dapat menjaga kualitas kepemimpinan di tengah perubahan sosial yang sangat cepat.

Dengan demikian, konsep kepemimpinan yang dikembangkan dalam *Tafsir al-Azhar* dan *Tafsir al-Misbah* tidak hanya memiliki nilai teologis dan normatif, tetapi juga menawarkan kerangka konseptual yang aplikatif dalam menjawab berbagai persoalan kepemimpinan kontemporer. Kepemimpinan Qur'ani menempatkan amanah, keadilan, integritas, dan kemaslahatan sebagai fondasi utama yang harus hadir dalam setiap praktik kepemimpinan, baik pada level individu, organisasi, maupun negara.

Kontribusi *Tafsir al-Azhar* dan *Tafsir al-Misbah* terhadap Pengembangan Teori Kepemimpinan Islam Kontemporer

Kajian terhadap *Tafsir al-Azhar* karya Hamka dan *Tafsir al-Misbah* karya Quraish Shihab menunjukkan bahwa keduanya tidak hanya memberikan penafsiran terhadap ayat-ayat kepemimpinan, tetapi juga menawarkan fondasi teoritik yang relevan bagi pengembangan paradigma kepemimpinan Islam kontemporer. Di tengah dominasi teori kepemimpinan modern yang banyak dikembangkan dari perspektif manajemen dan ilmu organisasi Barat, kedua tafsir tersebut menghadirkan perspektif alternatif yang menempatkan dimensi spiritual, moral, dan sosial sebagai inti kepemimpinan.

Salah satu kontribusi penting yang dapat ditemukan adalah integrasi antara legitimasi transendental dan legitimasi sosial. Dalam banyak teori kepemimpinan modern, legitimasi pemimpin umumnya diperoleh melalui proses formal, kapasitas profesional, atau dukungan pengikut. Sebaliknya, Hamka dan Quraish Shihab menegaskan bahwa legitimasi kepemimpinan dalam Islam berakar pada amanah Ilahi yang harus diwujudkan melalui tanggung jawab sosial. Seorang pemimpin tidak cukup memperoleh pengakuan dari manusia, tetapi juga harus mempertanggungjawabkan kepemimpinannya di hadapan Allah Swt. Perspektif ini menghasilkan model kepemimpinan yang memiliki dimensi akuntabilitas ganda, yakni akuntabilitas vertikal kepada Tuhan dan akuntabilitas horizontal kepada masyarakat.

Kontribusi kedua berkaitan dengan konsep kepemimpinan berbasis moralitas. Hamka menekankan bahwa keberhasilan seorang pemimpin sangat ditentukan oleh kualitas karakter yang dimilikinya. Kepemimpinan bukan sekadar kemampuan memengaruhi orang lain, melainkan kemampuan menjaga integritas di tengah godaan kekuasaan. Penekanan pada karakter ini menjadikan kepemimpinan Islam lebih dekat dengan pendekatan *character-based leadership* yang saat ini berkembang dalam studi kepemimpinan global. Namun demikian, karakter dalam perspektif Islam tidak hanya dibentuk oleh norma sosial, melainkan juga oleh kesadaran spiritual dan nilai-nilai ketuhanan.

Quraish Shihab memberikan kontribusi yang berbeda tetapi saling melengkapi. Ia memperluas makna kepemimpinan dari sekadar jabatan formal menjadi tanggung jawab universal yang melekat pada setiap manusia. Perspektif ini memperlihatkan bahwa kepemimpinan tidak terbatas pada kepala negara, pemimpin organisasi, atau tokoh masyarakat, melainkan mencakup setiap individu yang memiliki tanggung jawab terhadap dirinya, keluarganya, lingkungannya, dan masyarakat luas. Pemahaman tersebut memperkaya teori kepemimpinan Islam dengan menempatkan kepemimpinan sebagai bagian dari etika kehidupan sehari-hari.

Selain itu, kedua mufasir menawarkan konsep kepemimpinan yang berorientasi pada kemaslahatan (*public welfare*). Dalam QS. Shad [38]: 26, keadilan ditempatkan sebagai tujuan utama kekuasaan. Keadilan bukan hanya instrumen administratif, melainkan prinsip moral yang harus menjadi dasar seluruh kebijakan publik. Perspektif ini memiliki relevansi yang tinggi dengan konsep *good governance* yang menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perbedaannya, konsep Qur'ani memberikan landasan normatif yang lebih kuat karena keadilan diposisikan sebagai perintah agama sekaligus kebutuhan sosial.

Hasil sintesis antara *Tafsir al-Azhar* dan *Tafsir al-Misbah* menunjukkan bahwa kepemimpinan Islam dapat dipahami melalui empat pilar utama. Pertama, amanah sebagai dasar legitimasi kepemimpinan. Kedua, kompetensi dan integritas sebagai syarat utama memperoleh dan mempertahankan kepemimpinan. Ketiga, keadilan sebagai orientasi utama penggunaan kekuasaan. Keempat, kemaslahatan sebagai tujuan akhir seluruh aktivitas kepemimpinan. Keempat pilar tersebut membentuk suatu model kepemimpinan yang tidak hanya efektif secara organisatoris, tetapi juga bermakna secara etis dan spiritual.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, model kepemimpinan yang dibangun melalui sintesis pemikiran Hamka dan Quraish Shihab memiliki relevansi yang sangat besar. Berbagai tantangan seperti korupsi, penyalahgunaan kewenangan, polarisasi sosial, dan krisis kepercayaan publik menunjukkan perlunya paradigma kepemimpinan yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga pada integritas dan kemaslahatan. Oleh karena itu, pemikiran kedua mufasir tersebut dapat menjadi sumber inspirasi bagi

pengembangan kepemimpinan dalam bidang pemerintahan, pendidikan, ekonomi, maupun kehidupan sosial kemasyarakatan.

Lebih jauh, temuan ini memperlihatkan bahwa al-Qur'an tidak hanya berbicara mengenai aspek teologis kepemimpinan, tetapi juga menawarkan kerangka etik dan sosial yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks modern. Kepemimpinan Qur'ani bukanlah konsep yang bersifat historis dan terbatas pada masa tertentu, melainkan sebuah paradigma yang terus relevan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Dengan demikian, *Tafsir al-Azhar* dan *Tafsir al-Misbah* memberikan kontribusi penting dalam memperkaya khazanah teori kepemimpinan Islam sekaligus memperkuat posisi tafsir Nusantara dalam diskursus kepemimpinan global.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep kepemimpinan dalam al-Qur'an sebagaimana ditafsirkan oleh Hamka dalam *Tafsir al-Azhar* dan Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah* dibangun atas fondasi amanah, tanggung jawab moral, keadilan, dan orientasi kemaslahatan. Analisis terhadap QS. al-Baqarah [2]: 30, QS. al-Baqarah [2]: 124, dan QS. Shad [38]: 26 memperlihatkan bahwa kepemimpinan dalam Islam tidak dipahami sebagai privilese kekuasaan, melainkan sebagai mandat Ilahi yang harus dijalankan dengan integritas dan akuntabilitas yang tinggi.

Hamka menekankan pentingnya dimensi moral, keteladanan, dan perjuangan dalam kepemimpinan, sedangkan Quraish Shihab memberikan perhatian pada aspek universalitas amanah, kedewasaan intelektual, dan relevansi sosial dari nilai-nilai Qur'ani. Meskipun menggunakan pendekatan tafsir yang berbeda, keduanya memiliki kesamaan pandangan bahwa legitimasi kepemimpinan tidak ditentukan oleh status sosial, kekuatan politik, ataupun garis keturunan, melainkan oleh kualitas moral dan kemampuan menghadirkan keadilan bagi masyarakat.

Hasil penelitian ini menghasilkan sintesis konseptual berupa model kepemimpinan Qur'ani yang terdiri atas empat pilar utama, yaitu amanah sebagai dasar legitimasi, integritas sebagai syarat kepemimpinan, keadilan sebagai orientasi penggunaan kekuasaan, dan kemaslahatan sebagai tujuan akhir kepemimpinan. Model tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan Islam memiliki dimensi spiritual, etis, dan sosial yang saling terintegrasi.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat kontribusi tafsir Nusantara dalam pengembangan teori kepemimpinan Islam kontemporer. Secara praktis, temuan ini menawarkan kerangka normatif yang relevan untuk menjawab berbagai tantangan kepemimpinan modern, termasuk krisis integritas, penyalahgunaan kekuasaan, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi sosial maupun politik. Penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian dengan mengintegrasikan perspektif tafsir kontemporer lainnya atau menguji implementasi nilai-nilai kepemimpinan Qur'ani dalam praktik kelembagaan di berbagai sektor kehidupan masyarakat Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

Abdelwahed, N. A. A., Al Doghan, M. A., Saraih, U. N., & Soomro, B. A. (2025). Unleashing Potential: Islamic Leadership's Influence on Employee Performance Via Islamic Organizational Values, Organizational Culture and Work Motivation. *International Journal of Law and Management*, 67(2), 165–190. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-01-2024-0019>

- Adawiyah, R., & Ummah, F. S. (2024). Visionary Leadership Kepala Madrasah dalam Mengembangkan Budaya Organisasi yang Inklusif dan Berdaya Saing di Lembaga Pendidikan Islam. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5(1), 1402–1411. <https://doi.org/10.54373/IMEIJ.V5I1.2063>
- Ahmed, S. K. (2024). The Pillars of Trustworthiness in Qualitative Research. *Journal of Medicine, Surgery, and Public Health*, 2, 100051. <https://doi.org/10.1016/J.GLMEDI.2024.100051>
- Ahmed, S. K., Mohammed, R. A., Nashwan, A. J., Ibrahim, R. H., Abdalla, A. Q., M. Ameen, B. M., & Khahir, R. M. (2025). Using Thematic Analysis in Qualitative Research. *Journal of Medicine, Surgery, and Public Health*, 6(2), 100198. <https://doi.org/10.1016/j.gmedi.2025.100198>
- Almusaed, A., Almssad, A., & Yitmen, I. (2025). Qualitative Data Collection and Management. *Practice of Research Methodology in Civil Engineering and Architecture*, 417–454. https://doi.org/10.1007/978-3-031-97393-2_13
- Alqhaiwi, Z. O., Bednall, T., & Kyndt, E. (2023). Excellence in leadership in the Arab world: Islamic principles and tribal values. Evidence from Jordan. *International Journal of Cross Cultural Management*, 23(3), 613–634. <https://doi.org/10.1177/14705958231212742>
- Arvienu, N. G. B. (2024). Pengaruh Hybrid Work dan Kepemimpinan Transformasional Terhadap Kepuasan Kerja dengan Lingkungan Kreatif Sebagai Variabel Mediasi pada PT Semesta Integrasi Digital. *Journal of Young Entrepreneurs*, 3(3). <https://ejournal.upnvj.ac.id/jye/article/view/9365>
- Chughtai, M. S., Syed, F., Naseer, S., & Chinchilla, N. (2023). Role of Adaptive Leadership in Learning Organizations to Boost Organizational Innovations with Change Self-Efficacy. *Current Psychology 2023* 43:33, 43(33), 27262–27281. <https://doi.org/10.1007/s12144-023-04669-z>
- Creswell, W. J. (2016). Penelitian Kualitatif dan Desain Riset. *Penelitian Kualitatif*.
- Fitri, Y., Rini, R., & Amilin, A. (2024). Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat. *Jurnal Bimas Islam*, 17(1), 215–243. <https://doi.org/10.37302/jbi.v17i1.1013>
- Hamka. (2015). *Tafsir al-Azhar*. <https://www.gemainsani.co.id/product/detail/2056-1-set-tafsir-al-azhar>
- Kareem, J., Patrick, H. A., & Prabakaran, N. (2025). Exploring the Factors of Learning Organization in School Education: The Role of Leadership Styles, Personal Commitment, and Organizational Culture. *Central European Management Journal*, 33(2), 232–251. <https://doi.org/10.1108/CEMJ-12-2023-0457>
- Karim, A., Fathurrohman, O., Muhammadun, Saripudin, W., Rahmat, D., & Mansir, F. (2023). Altruistic Works, Religion, and Corruption: Kais' Leadership to Shape Anti-Corruption Values in Pesantren. *Cogent Social Sciences*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2238968>
- Khamid, N. (2024). Kiai Leadership Patterns in the Modernization of Boarding School Management. *AFKARINA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 9(1), 35–46. <https://doi.org/10.33650/AFKARINA.V9I1.9397>
- Mawardi, M., Hambali, H., & Hidayat, H. (2023). Building Madrasah Work Culture through Transformative Leadership Based on Religious. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(2), 506–520. <https://doi.org/10.33650/AL-TANZIM.V7I2.4697>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2018). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. *SAGE Publications, Inc*, XII–384. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-data-analysis/book246128>

- Mujahid, Z. (2024). Budaya Literasi dalam Mewujudkan Organisasi Pembelajar (the Learning Organization) di Madrasah Ibtidaiyah Manarul Islam. *Allimna: Jurnal Pendidikan Profesi Guru*, 3(02), 16–33. <https://doi.org/10.30762/ALLIMNA.V3I02.2001>
- Nurwahidah, I., & Iskandar, S. (2022). Kepemimpinan Kepala Sekolah Meningkatkan Kecakapan Multiliterasi di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(4). <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3093>
- Purwanto, A., Pramono, R., Asbari, M., Senjaya, P., Hadi, A. H., & Andriyani, Y. (2020). Pengaruh Kepemimpinan terhadap Kinerja Guru Sekolah Dasar dengan Keterlibatan Kerja dan Budaya Organisasi sebagai Mediator. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2(1).
- Rahman, A., Abqary, Q., & Firdaus, H. (2022). Konsep Dimensi Manusia Perspektif Murtadha Muthahhari dan Nicolaus Driyarkara. *Paradigma: Jurnal Kalam Dan Filsafat*, 4(02), 10–22. <https://doi.org/10.15408/paradigma.v4i02.30404>
- Sahadi, Sunarti, N., & Puspitasari, E. (2022). Pengembangan Organisasi (Tinjauan Umum pada Semua Organisasi). *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 399–412. <https://doi.org/10.25157/MODERAT.V8I2.2712>
- Shihab, M. Q. (2009). Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 14. *Lentera Hati*, (9). <https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/14803/tafsir-al-mishbah-pesan-kesan-dan-keserasian-al-qur-an-volume-14.html>
- Shihab, M. Q. (2021). *Tafsir Al Mishbah Edisi 2021*. <https://store.lenterahati.com/products/tafsir-al-mishbah-edisi-2021-full-set>
- Sitio, A. L., Jurnal, H., & Aslami, N. (2023). Strategi Pemimpin dalam Pengelolaan Perubahan Organisasi. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 3(2), 35–52. <https://doi.org/10.55606/jimek.v3i2.1761>
- Srianahayu, A. D. (2024). Kepemimpinan Karismatik dan Visioner Kyai dalam Pengembangan Manajemen Mutu Pesantren. *Al-Fikri: Jurnal Studi Dan Penelitian Pendidikan Islam*, 7(1), 21–32. <https://doi.org/10.30659/JSPI.7.1.21-32>
- Subaidi, S., Arsyad, J., & Kisworo, A. Y. (2024). Empowering Islamic Values: The Role of Madrasah Head Leadership in Extracurricular Enrichment. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8(2), 624–634. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v8i2.8268>
- Sugiyono, S. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. In *Alfabeta*. <https://elibrary-dev.nusamandiri.ac.id/readbook/240077/metode-penelitian-kuantitatif-kualitatif-dan-r-d.html>